



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	4
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan	5
C. Hasil Yang Dicapai	8
D. Kesimpulan Dan Saran	10
E. Penutup	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	12
SOP Permohonan Data	
SK PPID Tahun 2023	
DIP Tahun 2023	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 13 fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Cabang Dinas;
11. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
13. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas :

1. Sekretariat
 - Subbagian Perencanaan Program
 - Subbagian Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan, diantaranya :

1. KPHP Santan
2. KPHP Meratus
3. KPHP Bongan
4. KPHP Bengalon
5. KPHP Kendilo
6. KPHP Berau Barat
7. KPHP Batu Ayau
8. KPHP Sub Das Belayan
9. KPHP Telake
10. KPHP Manubar
11. KPHP Mook Manoor Bulatn
12. KPHP Kelinjau
13. KPHP Delta Mahakam
14. KPHP Damai
15. KPHP Berau Utara
16. KPHP Berau Tengah
17. KPHP Berau Pantai
18. KPHL Balikpapan
19. KPHL Batu Rook
20. Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang fungsinya mengelola data dan informasi mengenai masing-masing OPD.

Sebagai pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, PPID mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks penyediaan data dan informasi kehutanan, database Kehutanan, media informasi (*Website*), Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi. Amanah dan peran strategis PPID tersebut telah menjadikan salah satu prioritas pengembangan data dan informasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas tersebut telah diterjemahkan dalam program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan dengan kegiatan pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi data informasi kehutanan pada Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan dan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka perlu disusun laporan layanan informasi publik pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap ada permohonan data dan informasi yang diajukan pada Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan dilayani dengan baik. Permohonan data dan informasi yang ditujukan kepada setiap bidang Dinas Kehutanan akan diteruskan kepada PPID. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan data dan informasinya dapat mendatangi ruang Layanan Informasi atau ruangan PPID Dinas Kehutanan dengan syarat membawa surat pengantar/resmi dan permohonan data bisa melalui online yang telah tersedia pada *website* Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



Alur Permohonan Informasi Publik

Selain memberikan layanan data dan informasi atas dasar permintaan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga secara aktif memberikan layanan data dan informasi mengupload data dan informasi secara berkala. Situs resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur <https://dishut.kaltimprov.go.id/file-kehutanan> menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang wajib disediakan dan diupload pada situs *website* secara berkala.

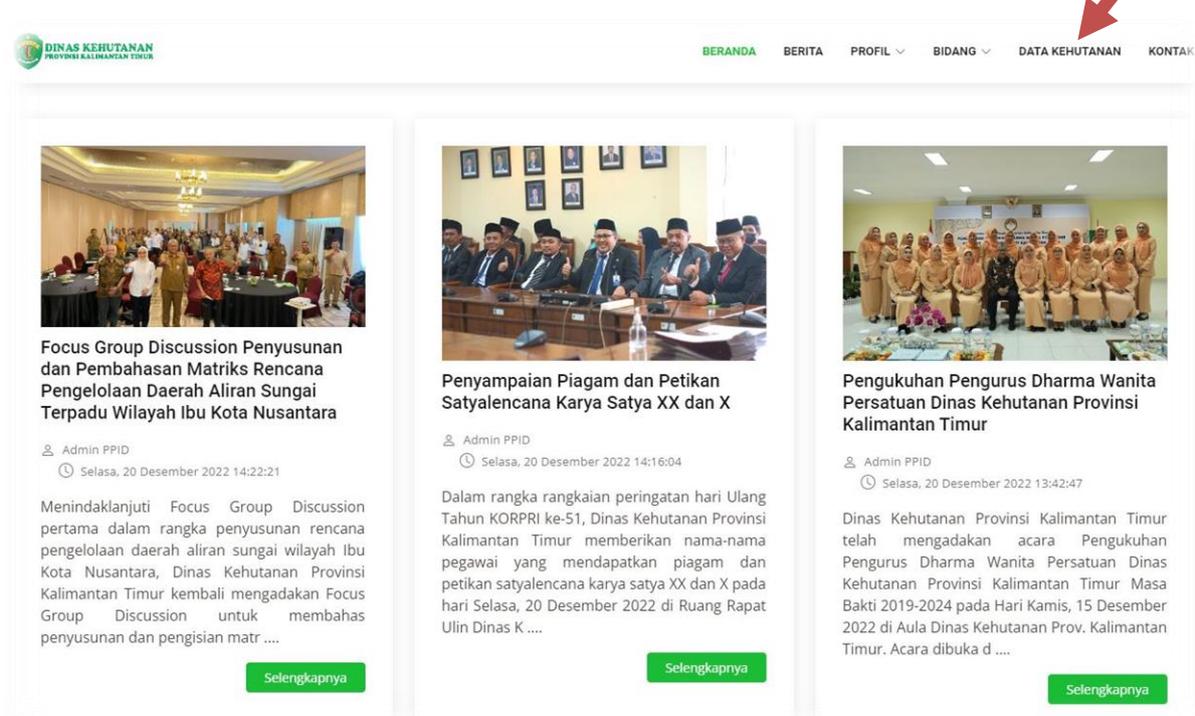
Operasional layanan informasi publik yang dilaksanakan pada ruang Layanan Informasi atau ruangan PPID dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 16.30 WITA. Namun, diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan permintaan data dan informasi dengan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan formulir permohonan data secara online yang tersedia di *website* dan email dishut.ppid@gmail.com yang terdapat pada *website* tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyediakan ruangan yang berisi 4 meja, 4 kursi staf dan 3 kursi tamu, 3 PC Desktop All In One dan 1 Laptop. Ruangan ini dilengkapi 1 AC, akses internet dan 2 rak lemari besar untuk menyimpan buku-buku tentang yang berhubungan dengan bidang kehutanan.



Foto Ruang Layanan Informasi Publik

Data-data yang terkumpul juga dapat diakses melalui *website* resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu <https://dishut.kaltimprov.go.id/file-kehutanan> pada bagian menu **DATA KEHUTANAN** seperti pada gambar dibawah ini :



Laman website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 orang yang bertugas melayani permintaan data dan informasi dengan kualifikasi yang membidangi komunikasi, kehumasan, teknisi jaringan komputer, layanan data dan informasi.

Guna menjaga data tetap update secara rutin staf PPID meminta data disetiap bidang-bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur agar saling koordinasi data yang telah diperbaharui.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di bebaskan dalam Rencana Kerja Anggaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2023 PPID Pelaksana Dinas Kehutanan menerima 9 (sembilan) permohonan data dan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi antara lain dari Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permohonan data dan informasi waktu yang diperlukan atau dikabulkan selama 5 hari kerja. Permohonan data dan informasi yang dikabulkan sebanyak **9 Permohonan**, tidak ada permohonan ditolak.

Tabel Rincian Permohonan Informasi Publik

No	Siapa yang meminta	Data apa yang diminta	Data apa yang diberikan	Permintaan data yang ditolak
1.	Polres Samarinda	1. Struktur Organisasi 2. Data Perusahaan Kehutanan tahun 2023	1. Struktur Organisasi 2. Data Perusahaan PBPH-Hutan Alam (HA) 3. Data Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)	Tidak Ada
2.	Korem 091 Samarinda	1. Data Perusahaan Kehutanan tahun 2023	1. Data Perusahaan PBPH-Hutan Alam (HA) 2. Data Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)	Tidak Ada
3.	BPS Prov. Kaltim	1. Luas Kawasan dan Konservasi Perairan Menurut Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 2. Jumlah Perusahaan dan Luas IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI Menurut	1. Luas Kawasan dan Konservasi Perairan Menurut Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 2. Jumlah Perusahaan dan Luas IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI Menurut	Tidak Ada

		<p>Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah Pohon yang direboisasi dan rehabilitasi pada Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023 4. Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis dan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 	<p>Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah Pohon yang direboisasi dan rehabilitasi pada Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023 4. Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis dan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 	
4.	BPS Prov. Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Kayu Bulat Per Triwulan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 2. Produksi Kayu Olahan Per Triwulan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 3. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Per Triwulan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Kayu Bulat Per Triwulan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 2. Produksi Kayu Olahan Per Triwulan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 3. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Per Triwulan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 	Tidak Ada
5.	BPS Prov. Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktori Perusahaan Kehutanan 2023 2. Direktori Usaha Pertanian Kehutanan Non Rumah Tangga 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Perusahaan PBPH-Hutan Alam (HA) 2. Data Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) 3. Kelompok Tani Hutan (KTH) 	Tidak Ada
6.	Sekda Pemkot Samarinda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Sektoral Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Kayu Bulat Per Triwulan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 2. Produksi Kayu Olahan Per Triwulan Kab/Kota Provinsi Kaltim Tahun 2023 	Tidak Ada
7.	Kantor Pelayanan Pajak Kab. Berau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Perusahaan Kehutanan Wilayah Kab. Berau 2. Produksi Kayu Bulat Kab. Berau Tahun 2023 3. Produksi Kayu Olahan Kab. Berau Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Perusahaan PBPH-Hutan Alam (HA) Kab. Berau 2. Data Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Kab. Berau 3. Produksi Kayu Bulat Kab. Berau Tahun 2023 4. Produksi Kayu Olahan Kab. Berau Tahun 2023 	Tidak Ada
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kukar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Kayu Bulat Kab. Kukar Tahun 2023 2. Produksi Kayu Olahan Kab. Kukar Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Kayu Bulat Kab. Kukar Tahun 2023 2. Produksi Kayu Olahan Kab. Kukar Tahun 2023 	Tidak Ada

9.	Kantor Pelayanan Pajak Kab. PPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Perusahaan Kehutanan Wilayah Kab. PPU 2. Produksi Kayu Bulat Kab. PPU Tahun 2023 3. Produksi Kayu Olahan Kab. PPU Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Perusahaan PBPH-Hutan Alam (HA) Kab. PPU 2. Data Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Kab. PPU 3. Produksi Kayu Bulat Kab. PPU Tahun 2023 4. Produksi Kayu Olahan Kab. PPU Tahun 2023 	Tidak Ada
----	---------------------------------	--	---	-----------

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2023 Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima keberatan dan gugatan tentang permintaan data dan informasi dari pihak luar.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan Unit Kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga pelaksana PPID harus aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi.
2. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan Unit Kerja masih kurang aktif.

Saran

1. Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi bagi Unit-unit Teknis pada Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis website.
4. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi pada Lingkungan UPTD KPHP/KPHL/TAHURA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

E. PENUTUP

Laporan layanan informasi publik pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mengakomodir amanah tentang keterbukaan informasi. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terbaru, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

<p>DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p>	NOMOR SOP	01/DK-I/PPID/2021
	TGL. PEMBUATAN	13 Oktober 2021
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KEPALA</p>  <p style="text-align: center;">H. AMRULLAH NIP. 19611214 198703 1 010</p>
NAMA SOP	: SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik3. Surat Keputusan Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi2. Memahami Tentang Pelayanan Informasi Publik	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Formulir Permohonan Informasi dan Softcopy Permohonan Informasi Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Laptop, Printer, Pulpen dan Buku	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAPATAN :	
Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi adalah salah satu tugas dari PPID Pembantu Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Dokumen Formulir Permohonan Informasi	

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan Informasi Dari Pemohon	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> AtasanPPID[Atasan PPID] AtasanPPID --> PPID[PPID] PPID --> Proses1[Proses] Proses1 --> Proses2[Proses] Proses2 --> Selesai([Selesai]) </pre>			Surat/formulir permohonan informasi	15 Menit	Surat/formulir permohonan informasi telah terisi	Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Bab VI Pasal 21 & 22
2	Memberikan Tanda Bukti Atas Permohonan Informasi Dan Mencatat Permohonan Informasi Ke Dalam Buku Register Layanan Informasi Publik				Formulir Permohonan Informasi	15 Menit	Nomor Register dan lembar disposisi PPID	
3	Menyampaikan Permohonan Informasi Kepada PPID				Buku Register	10 Menit	Disposisi	
4	Melakukan Koordinasi Untuk Menyusun Jawaban Atas Permohonan Informasi				Disposisi	3 s/d 5 Hari	Draft Jawaban Permohonan Informasi Publik	
5	Menandatangani Jawaban Atas Permohonan Informasi				Jawaban Permohonan Informasi Publik	1 hari	Jawaban Permohonan Informasi Publik	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 800/02/KPTS/DK-I/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KEHUTANAN

- Menimbang :
1. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 3. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.555/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara data dan informasi serta dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik;
 6. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi;
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibebankan kepada Anggaran yang tersedia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan sebelumnya dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA,

H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750807 200003 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim di Samarinda
3. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 800/02/KPTS /DK-I/2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEHUTANAN PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR

Pembina	Kepala Dinas Kehutanan
Ketua	Sekretaris
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
Penginput Data dan Pengelola Website	Jumaidi Akhmadin (Koordinator) Akhmad Ari Ashari Bahrul Muhid Rizki Rahmiatul Nur Rizky Ashrini Hasmir Rizky Ananta H.P
Penyedia Data	Sekretariat
	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
	Kepala Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan
	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
Penyedia Data	1. Kepala UPTD KPHP Damai 2. Kepala UPTD KPHP Batu Ayau 3. Kepala UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn 4. Kepala UPTD KPHL Batu Rook 5. Kepala UPTD KPHP Santan 6. Kepala UPTD KPHP Bongon 7. Kepala UPTD KPHL Balikpapan 8. Kepala UPTD KPHP Telake 9. Kepala UPTD KPHP Kendilo 10. Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam 11. Kepala UPTD KPHP Sub DAS Belayan 12. Kepala UPTD KPHP Meratus 13. Kepala UPTD KPHP Berau Tengah 14. Kepala UPTD KPHP Berau Pantai 15. Kepala UPTD KPHP Berau Utara 16. Kepala UPTD KPHP Berau Barat 17. Kepala UPTD KPHP Kelinjau 18. Kepala UPTD KPHP Bengalon 19. Kepala UPTD KPHP Manubar 20. Kepala UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto



KEPALA,

H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750807 200003 1 003



DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Disusun Oleh :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

No	Nama Informasi	Ringkasan	Penanggung Jawab Informasi	Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Informasi Umum Tentang Dinas Kehutanan	Profil Kehutanan	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Web	Selama Berlaku
2.	Laporan Keuangan Dinas Kehutanan	Laporan Keuangan Dinas Kehutanan yang telah diaudit	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Pdf	Selama Berlaku
3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan	Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Pdf	Selama Berlaku
4.	Rencana Kerja Dinas Kehutanan	Rencana Kerja Dinas Kehutanan	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Pdf	Selama Berlaku
5.	Pernyataan Perjanjian Kinerja	Pernyataan Perjanjian Kinerja	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Pdf	Selama Berlaku
6.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Pdf	Selama Berlaku
7.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Pdf	Selama Berlaku
8.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Pdf	Selama Berlaku
9.	Jumlah dan Sebaran PNS Dinas Kehutanan	Informasi jumlah sebaran PNS lingkup dinas kehutanan	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
10.	Kawasan Hutan dikelola Masyarakat	Informasi Luas Kawasan Hutan yang dikelola Masyarakat	Bidang PPMH	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
11.	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	Informasi terkait usaha ekonomi produktif kelompok tani hutan	Bidang PPMH	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku

12.	Jumlah Usaha Izin Perhutanan Sosial	Informasi Jumlah Usaha Izin Perhutanan Sosial	Bidang PPMH	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
-----	-------------------------------------	---	-------------	---------------------	-----------	----------------

2. Informasi yang wajib diumumkan **secara serta merta**

No	Nama Informasi	Ringkasan	Penanggung Jawab Informasi	Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Sebaran Titik Hotspot kebakaran	Informasi terkait jumlah sebaran titik panas/hotspot kebakaran	Bidang PKSDAE	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
2.	Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	Informasi luas kejadian kebakaran hutan dan lahan	Bidang PKSDAE	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku

3. Informasi yang wajib tersedia **setiap saat**

No	Nama Informasi	Ringkasan	Penanggung Jawab Informasi	Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Rencana Strategi Dinas Kehutanan	Informasi terkait rencana strategi dinas kehutanan	Sekretariat	Dishut Prov. Kaltim	Pdf	Selama Berlaku
2.	Luas Kawasan Hutan dan Lahan	Informasi Luas Kawasan Hutan dan Lahan	Bidang PPKH	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
3.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan TAHURA	Data Jumlah KPHP dan KPHL	Bidang PPKH	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
4.	Produksi Kayu Olahan	Informasi jumlah produksi kayu olahan	Bidang PPKH	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku

5.	Produksi Kayu Bulat	Informasi jumlah produksi kayu bulat	Bidang PPKH	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
6.	Kerusakan Terhadap Kawasan Hutan	Data gangguan kawasan hutan seperti pembalakan liar dll	Bidang PKSDAE	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
7.	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Data luas rehabilitasi hutan dan lahan	Bidang DAS dan RHL	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
8.	Perbenihan Tanaman Hutan	Informasi terkait jumlah SK Pengada benih/bibit dan sertifikasi sumber benih	Bidang DAS dan RHL	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
9.	HCV di Kawasan Hutan dan Lahan	Jumlah HCV kawasan hutan dan lahan	Bidang PKSDAE	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku

Keterangan :

Bidang PPKH : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bidang PKSDAE : Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Bidang DAS dan RHL : Bidang Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Bidang PPMH : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Samarinda, Februari 2023

Ketua PPID,

ttd

Ir. Hj. Zaina Yurda, M.P

5.	Produksi Kayu Bulat	Informasi jumlah produksi kayu bulat	Bidang PPKH	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
6.	Kerusakan Terhadap Kawasan Hutan	Data gangguan kawasan hutan seperti pembalakan liar dll	Bidang PKSDAE	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
7.	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Data luas rehabilitasi hutan dan lahan	Bidang DAS dan RHL	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
8.	Perbenihan Tanaman Hutan	Informasi terkait jumlah SK Pengada benih/bibit dan sertifikasi sumber benih	Bidang DAS dan RHL	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku
9.	HCV di Kawasan Hutan dan Lahan	Jumlah HCV kawasan hutan dan lahan	Bidang PKSDAE	Dishut Prov. Kaltim	Tabel/Pdf	Selama Berlaku

Keterangan :

Bidang PPKH : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bidang PKSDAE : Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Bidang DAS dan RHL : Bidang Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Bidang PPMH : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Samarinda, Februari 2023

Ketua PPID,



Ir. Hj. Zaina Yurda, M.P



PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Kesuma Bangsa - Samarinda

Posel : dishut.kaltim@gmail.com

 dishut.kaltimprov.go.id  [@dishut_kaltim](https://www.instagram.com/dishut_kaltim)  Dinas Kehutanan ProvKaltim  Dishut TV